

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Belum adanya hukum yang mengikat yang membahas tentang penanganan jenazah pasien yang meninggal akibat Covid di Indonesia, maka adanya Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat dijadikan dasar sebagai hukum yang mengikat dan panduan dalam pelaksanaan penanganan jenazah pasien yang terpapar Covid-19.

Di dalam Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 dijelaskan tentang suatu aturan atau pedoman yang membahas mengenai pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) seorang muslim yang terinfeksi COVID-19

Pengujian fatwa MUI apabila hendak dijadikan doktrin hukum tertulis, maka yang menjadi bahan pertimbangan tentunya berkenaan dengan metode yang harus dilalui, mulai dari:

1. Fatwa MUI untuk menjadi doktrin hukum tertulis tidak boleh asal-asalan. Dimana Fatwa MUI bukan hanya merupakan permintaan perorangan melainkan harus diajukan oleh lembaga keagamaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau bukan merupakan organisasi terlarang;
2. Fatwa MUI untuk menjadi doktrin hukum tertulis harus memperhatikan hak asasi manusia tidak sebatas umat Islam saja, walaupun isinya mungkin untuk umat Islam tetapi harus pula mempertimbangkan umat di luar Islam;
3. Nilai kebenaran fatwa MUI tidak boleh mengandung sifat relatif artinya Fatwa MUI apakah memiliki pandangan jauh kedepan bukan sekedar kasus sekarang saja;

Zulkifly Sanusi, 2022

KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

4. Fatwa MUI harus dapat menunjukkan naskah akademik. Hal ini sangat diperlukan agar dapat didudukkan sebagai doktrin hukum. Apabila negara menilai fatwa tidak memiliki naskah akademik maka tidak dapat didudukkan sebagai doktrin hukum dan akibatnya bisa diabaikan dalam pembentukan peraturan perundangundangan.

Dari hasil penelitian di wilayah Kecamatan Jati Asih, Bekasi periode bulan Maret 2020-Desember 2020, dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang tatacara penanganan jenazah pasien yang terpapar Covid-19 dan menolak untuk dilakukan penanganan sesuai protocol Covid. Sehingga terjadi kericuhan dalam masyarakat dalam proses pemulasarannya. Hal ini disebabkan karena belum adanya suatu pedoman atau aturan yang mengikat mengenai tata cara dan penanganan pasien Covid-19.

Dengan adanya Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai tatacara dan penanganan jenazah pasien yang terpapar Covid-19, maka masyarakat dapat menjadikan Fatwa MUI ini sebagai suatu dasar hukum yang mengikat sebagai pedoman dalam penanganan jenazah yang terpapar Covid-19, sehingga diharapkan tidak terjadi kericuhan dan pertentangan lagi dimasyarakat.

Dalam Fatwa MUI no 14 dan 18 tahun 2020 jdi jelaskan mengenai penanganan jenazah pasien terpapar Covid dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan. Hal ini sangat penting, karena dalam penanganannya orang yang membantu melakukan pemulasaran jenazah sangat rentan terhadap penularan kuman dari jenazah yang ditanganinya. Fatwa MUI tersebut sangat memperhatikan tentang Kesehatan.

SARAN

1. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang benar dan terus menerus mengenai penyakit Covid-19 dan tata cara pelaksanaan dalam menghadapi jenazah pasien yang meninggal akibat penyakit Covid-19, sehingga tidak terjadi kericuhan dalam masyarakat.
2. Pemerintah segera menjadikan Fatwa MUI mengenai pemakaman jenazah pasien Covid-19 sebagai suatu ketentuan hukum yang mengikat.